

ABSTRAK

Claudia Florencia Bunadi (01656180069)

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK YANG MENGELUARKAN *COVER NOTE* DALAM RANGKA REALISASI KREDIT BERKAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1590 K/PID.SUS/2015.

(ix + 104 halaman; 1 lampiran)

Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu implementasi atau bukti konkrit dari Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sejalan dengan kewenangannya, notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta untuk setiap perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dikehendaki oleh para pihak. Pada dunia perbankan, khususnya penyaluran kredit, Notaris punya peranan penting dalam meng-aktakan perjanjian kredit terutama pada perjanjian kredit dengan nominal yang besar, hal ini dikarenakan sifat pembuktian yang sempurna dari akta yang dibuat oleh notaris. Selain itu, sebelum pelaksanaan realisasi kredit, bank sebagai kreditur juga membutuhkan agunan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam hal ini notaris berperan untuk membuat *covernote* apabila objek yang akan menjadi agunan masih dalam proses pengurusan. Meskipun hingga saat ini tidak ada pengaturan mengenai kewenangan pembuatan *covernote* oleh Notaris, namun pada praktiknya Notaris sering diminta oleh pihak bank untuk pembuatan *covernote* agar kredit dapat segera direalisasikan. Sebagaimana yang terjadi dalam Kasus Posisi yang diteliti pada Putusan Mahkamah Agung No. 1590 K/Pid.Sus/2015, di mana Notaris secara sengaja menerbitkan *covernote* yang berisi keterangan tidak benar. Pada hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kekuatan hukum dari *covernote* dalam realisasi kredit hanyalah seperti surat atau dokumen umum lainnya, sekalipun *covernote* dikeluarkan oleh Notaris. Mengingat baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak ada pengaturan mengenai kewenangan dari Notaris untuk membuat *covernote*, dan apabila diterapkan pada Kasus Posisi sebagaimana dimaksud di atas, atas perbuatannya Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara Perdata, Pidana dan Administratif.

Referensi : 36 (1983-2018)

Kata Kunci: Notaris, Covernote, Realisasi Kredit.

ABSTRACT

Claudia Florencia Bunadi (01656180069)

NOTARY LIABILITY AS THE ISSUING PARTY OF COVER NOTE IN ORDER TO REALIZATION OF CREDIT RELATED TO THE SUPREME COURT'S DECISION NO. 1590 K/PID.SUS/2015.

(ix + 104 pages; 1 attachment)

Notary as a public official is one of the implementations or concrete proof of Article 1 paragraph 3 of the Constitution Law No. 1945. In line with their authority, a notary as a public official has the authority to make deeds for every act, agreement and stipulation that is required in the laws and regulations or desired by the parties. Notary have an important role in write down deeds of credit agreements, especially in large amount of credit, this is due to the perfect evidentiary nature of deeds made by notaries. on the other hands, before the implementation of credit realization, banks as creditors also need collateral as ordered by Undang-Undang No. 10/ 1998 about Banking. In this case, the notary has the role of making a covernote if the object is still in the process of being processed. Even though until now there are no regulations regarding the authority to create covernotes by the notary public, in practice, notaries are often asked by the bank to create a covernote so that credit can be realized immediately. As happened in the Case studied in the Supreme Court Decision No. 1590 K / Pid.Sus / 2015, where the notary deliberately published a covernote containing false information. In the research results, the authors conclude that the legal force of the covernote in credit realization is just like a letter or other general document, even though the covernote is issued by a notary public. In the results of the study, the authors concluded that for his actions, the notary could be responsible in a administrative, criminal and/or civil matters. In addition, the legal force of a covernote in credit realization is just like a letter or other general document, even if the covernote is issued by a notary public. considering that there are no arrangements regarding the authority of the notary to create a covernote.

References : 36 (1983-2018)

Key Words: Notary, Covernote, Realization Of Credit.